

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Fattah Nasution. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Harfa Creative, 2023.
- Aria Zurnetti. (2021). *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional* (Edisi ke-2). Depok: Rajawali Pers.
- Chairul Anwar. (1997). *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djamanat Samosir. (2013). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Hilman Hadikusuma. (1984). *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni.
- Hilman Hadikusuma. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- I Made Pasek Diantha. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Idrus Hakimy. (1988). *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kamil Dt. Nan Bapandieng Ameh. *Adat Minangkabau dalam Kehidupan Masyarakat dan Bernegara Sepanjang Masa*. Jakarta: Makalah Simposium Adat Minangkabau, 1991.
- Lilik Mulyadi. (2015). *Hukum Pidana Adat: Kajian Teori Norma Politik dan Prosedur*. Bandung: Alumni.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1985). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soejono Soekanto. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutan Remy Syahdeini. (2009). *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Aceh: Unimal Press.
- Yusriwal. (2013). *Hubungan Ranah dan Rantau*. Padang: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Zainuddin Musyair. (2011). *Membangkit Batang Tarandam: Adat Salingka Nagari di Minangkabau*. Yogyakarta: Ombak.

B. JURNAL

- Apriyani, R. (2018). Keberadaan Sanksi Adat dalam Penerapan Hukum Pidana Adat. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 6(3), 227–246.
- Awaluddin, S., Rumra, M. Y., & Rumra, M. Z. (2024). Pencegahan Hoax di Media Sosial: Studi Kriminologi dan Kesadaran Hukum Masyarakat Digital. *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3(3), 01-15.
- Danil, E. (2012). Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 583-596."
- Jerabu, A. (2014). *Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Rangka Otonomi Daerah di Desa Colol Kecamatan Pocoranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur (studi kasus)* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Maunatlala, K., & Maimela, C. (2020). The implementation of customary law of succession and common law of succession respectively: With a specific focus on the eradication of the rule of male primogeniture. *De Jure Law Journal*, 53(1), 36–53.
- Nasution, A. (2020). Ujaran kebencian dalam perspektif hukum adat: Studi kasus di Sumatera Utara. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 45–60.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 13(2), 177-181.
- Nugroho, A. (2021). Politik Identitas dan Ujaran Kebencian di Indonesia: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 15(2), 123–135.
- Panjaitan, Y. B., & Rahayu, D. A. (2024). Hukum Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Pendekatan Restorative Justice. *MLJ Merdeka Law Journal*, 5(2), 187-195.
- Rahmawati, N. (2022). Pendidikan Toleransi dalam Mencegah Ujaran Kebencian. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 10(4), 78–89.
- Ridel Filbert Tuelah, dkk. (2023). "Praktek Penegakan Hukum yang Terkait dengan Ujaran Kebencian di Indonesia." *Lex Privatum* 11 (3).
- Rini Apriyani. (2018). Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 6(3), 227–246.
- Sari, R. A., & Prabowo, H. (2020). Ujaran Kebencian dalam Konteks Hukum Adat: Analisis dan Solusi. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 45–60.
- Setiawan, A. (2021). Ujaran kebencian dalam hukum pidana: Tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 123–140.

- Umar, M. C., & Riza, Y. (2022). Peran Ninik Mamak, Mamak dan Kamanakan di Minangkabau. *Jurnal Budaya Nusantara*, 5(3), 174-180.
- Yamarizky, M. D. A. (2023). Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau). *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 72-81.
- Yuhaldi. (2022). Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dan implikasinya dalam bimbingan dan konseling. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, 5(2), 403–406.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018

Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang (*Hate Speech*) Ujaran Kebencian.

Undang-Undang Nan Duo Puluah

D. INTERNET

Asfinawati. 2024. “Menghadapi KUHP Baru: Apakah Suara Kita Masih Merdeka?” *LBH Pengayoman*, 7 Juni. Diakses dari <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/menghadapi-kuhp-baru-apakah-suara-kita-masih-merdeka/>.

Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Daerah Sumatera Barat. <https://sumbar.bps.go.id>

Definisi Hate Speech. (n.d.). *Tugas Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Diakses 10 April 2025, dari <https://hatespeechgroup.wordpress.com/pengertianhatespeech/>

Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Nagari Pariangan, Desa Terindah di Dunia. Diakses 20 Maret 2025, dari <https://pajak.go.id/id/artikel/nagari-pariangan-desa-terindah-di-dunia>

Kamang Darussalam. (2019). *Peradilan Adat: Evolusi Hukum & Peradilan Adat Minangkabau*. Diakses 21 Maret 2025, dari

<https://nagarikamang.wordpress.com/2019/04/09/16-peradilan-adat-evolusi-hukum-peradilan-adat-minangkabau/>

Katadata Insight Center. *Jumlah Penduduk Kabupaten Tanah Datar 382,33 Ribu Jiwa (Data per 2024)*. Diakses 30 Mei 2025, dari <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/be84c683e1f8caf/jumlah-penduduk-kabupaten-tanah-datar-382-33-ribu-jiwa-data-per-2024>.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Diakses 13 April 2025, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/eksistensi>

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar. (2024). *Keputusan Nomor 489 Tahun 2024 tentang Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024*. Diakses 30 Mei 2025, dari https://jdih.kpu.go.id/data-kabko/tanahdatar/data_kepkpu/SK%20NOMOR%20489%20LOKASI%20KAMPANYE%20KPU%20TANAH%20DATAR.pdf.

Stekom University. *Kabupaten Tanah Datar*. P2K Stekom. Diakses 30 Mei 2025, dari https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kabupaten_Tanah_Datar.

